TANWIR: JOURNAL OF ISLAMIC CIVILIZATION
Vol. 2, No. 2, June 2026, (18-37)
ISSN: , E-ISSN:.
https://tanwir.ppitunisia.com/index.php/pt24/index

Rachid Ghannouchi: Pemikir Islam Tunisia

Ahmad Nabil Amir[1], Tasnim Abdul Rahman [2]
[1] International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM)
50480 Kuala Lumpur, Malaysia
[2] Universitas Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Kuala Nerus, 21300 Terengganu, Malaysia
email:nabiller2002@gmail.com, tasnimrahman@unisza.edu.my

Abstrak:

Artikel ini mengkaji pemikiran politik Rachid al-Ghannouchi dalam perkembangan politik Islam dan demokrasi di Tunisia. Fokus kajian diarahkan pada idealisme politik yang dikembangkannya melalui pergerakan al-Nahdah, yang berlandaskan prinsip kebebasan, keadilan, dan demokrasi, serta pengaruhnya terhadap perubahan politik melalui penentangan terhadap rezim otoriter Habib Bourguiba dan Zine el-Abidine Ben Ali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan dokumenter dan analisis konten, serta menerapkan pendekatan historis, deskriptif, dan analitis terhadap sumber-sumber arsip yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Nahdah, yang didirikan bersama oleh al-Ghannouchi pada 1980, memainkan peran penting dalam menentang warisan kolonialisme dan otoritarianisme di Tunisia. Pemikiran politik al-Ghannouchi turut mendorong terbangunnya kerja sama antara kelompok Islam dan sekuler berdasarkan supremasi hukum, kebebasan, dan nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci: Rachid Ghannouchi, MTI, Hizb al-Nahdah, Tunisia

Abstract:

The paper examines Rachid Ghannouchi's political thought within the development of political Islam and the democratic transition in Tunisia. It focuses on the political ideals advanced through the Ennahda Movement, founded on the principles of freedom, justice, and democracy, and its opposition to the authoritarian regimes of Habib Bourguiba (1957–1987) and Zine el-Abidine Ben Ali (1987–2011). Employing a qualitative methodology based on documentary research and content analysis, the study adopts historical, descriptive, and analytical approaches to examine archival sources. The findings show that Ennahda, founded by Ghannouchi in 1980, played a significant role in challenging authoritarianism and the legacy of colonialism in Tunisia.

Ghannouchi's political thought also facilitated cooperation between Islamic and secular forces, fostering a shared commitment to democracy, human rights, the rule of law, freedom, and justice.

Keywords: Rachid Ghannouchi, Islamic Tendency Movement, al-Nahdah, Tunisia

License: This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0):https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Pendahuluan

Artikel ini merumuskan pandangan politik Rachid al-Ghannouchi Khriji (lahir 22 Juni 1941), filsafat dan prinsip dasar demokrasi yang diungkapkan dalam tulisan-tulisannya seperti *Ad-dimuqratiyah fil Islam* (demokrasi dalam Islam) – diterjemahkan dari pandangan Bennabi, *Al-hurriyyah al-'ammah fi al-dawlah al-Islamiyyah* (kebebasan umum dalam negara Islam) dan lain-lain yang mengungkapkan pemikirannya tentang prinsip tata kelola, paham kebebasan, pembagian kekuasaan, sistem multipartai, kebijakan dan filsafat politik Islam (*siyasah syar'iyyah*). Pemikirannya tentang politik ini dikutip dari karya Azzam S. Tamimi yang menguraikan tentang sejarah hidup dan karier politiknya Rashid Ghannouchi: *A democrat within Islamism* yang mengartikulasikan peran dan strategi politiknya dalam kebangkitan gerakan Islam kontemporer dan pengaruh yang digerakkannya dalam menggembleng kekuatan sekuler dan Islamis di Timur Tengah.

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan pengaruh Ghannouchi di dunia Islam, sebagai seorang pemikir dan aktivis Islam yang terkemuka di Tunisia dan Afrika Utara. Ia menyoroti biografinya yang umum dan pengaruhnya terhadap aliran-aliran kiri dan non-konvensional serta konstruksi ijtihad yang dibentuknya dalam partai al-Nahdah (*Hizb Harakah al-Nahdah – The Renaissance Party*), sebagai pergerakan Islamis yang terbesar di Tunisia, yang meraih dukungan mayoritas dan pengakuan yang meluas dalam jaringan politik global. Tradisi reformis di Tunisia berasal dari warisan Islamis dan sekulernya sejak abad kesembilan belas. Proses evolusi dan pembentukan Ennahda ini bermula sejak 1960-an, dari Jama'ah al-Islamiyyah, kepada MTI (*Mouvement de la Tendence Islamique*), kepada Ennahda (Wolf, 2017).

Sejak peralihan kekuasaan yang dicapai oleh revolusi massal 2011, pemerintah yang dipimpin oleh Ennahda telah mengesahkan konstitusi baru Tunisia pada 27 Januari 2014, yang sebagian drafnya disusun oleh anggota-anggota parlemen Ennahda - yang telah meletakkan dasar bagi demokrasi serta melindungi kebebasan politik dan agama (Ghannouchi, 2016). Tunisia juga telah mencapai kemajuan politik yang signifikan dalam periode lima tahun sebelumnya yang dimungkinkan oleh transisi demokratis tersebut. Kebangkitan Hizbun Nahdah atau Partai Renaisans dari Tunisia ini mungkin merupakan peristiwa yang paling menarik yang telah terjadi di dunia Islam baru-baru ini. Ennahda adalah model dari gerakan moderat Islam yang merangkul demokrasi. Pemimpinnya Rachid Ghannouchi, yang hidup dalam pengasingan di London ketika pemerintahan Ben Ali, pulang setelah Musim Semi Arab dan memimpin partai dalam pemilihan umum yang akhirnya

memenangi 40 persen kursi pada Oktober 2011, dianggap sebagai Muslim demokrat yang sejati.

Ghannouchi ternyata lantang dalam pendiriannya tentang paham demokrasi dan sekularisme, istilah yang sangat diperdebatkan di kalangan Islamis. Dalam pidatonya di Centre for Study of Islam and Democracy pada 2 Maret 2012, Ghannouchi mengatakan: "Kemungkinan prosedur yang paling penting yang ditemukan oleh pandangan dunia sekuler pada tahap ini adalah sifat netralitas negara. Dengan kata lain, negara adalah penjamin bagi semua kebebasan baik agama, politik, atau lainnya. Dan negara tidak seharusnya campur tangan memihak pada partai ini atau lainnya. Sementara itu, ruang lingkup atau yurisdiksi negara terbatas pada 'ruang publik', ruang lingkup agama menjangkau ke ruang 'pribadi'." Beliau juga mengatakan: "Orbit yang utama bagi agama bukanlah aparatur negara, tetapi keyakinan pribadi dan individu. Tugas negara, bagaimanapun, adalah untuk menyediakan pelayanan kepada rakyat sebelum hal-hal lainnya, untuk menciptakan peluang kerja, dan untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, bukan untuk mengendalikan hati dan pikiran rakyat." (Ghannouchi, 2012).

Dengan pandangannya yang progresif ini, telah membawa pada keberhasilan Ennahda dalam meredakan ketegangan dan konflik politik yang meningkat di Tunisia. Perjuangannya telah membawa dampak yang signifikan dalam menggembleng kesadaran terhadap nilai-nilai kebebasan dan nahdah dalam merealisasikan cita-cita demokratis di Tunisia dan dunia Islam. Dasar dan kebijakan politiknya dirancang untuk mempertahankan hasrat kebebasan (*al-hurriyyah*) dan keadilan (*al-'adl*) dan hak asasi manusia (*huquq al-insan*), dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang plural dan kolektif serta prinsip syura dalam struktur kekuasaan.

> "We consider that a state is more Muslim, more Islamic, the more it has justice in it" – Kami menganggap sebuah negara lebih Muslim, lebih Islami, dengan lebih banyak keadilan ditegakkan di dalamnya (Ghannouchi, 1993)

Menurut John L. Esposito (2014) dalam pengantarnya pada naskah wawancara Noureddine Jebnoun dengan Rachid Ghannouchi, Ghannouchi adalah tokoh penting untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan Ennahda sebagai gerakan Islam dan pada kembalinya serta keberhasilannya dalam pemilihan umum dan perannya dalam membangun kembali Tunisia yang baru. Kepentingan Ghannouchi melampaui Tunisia yang dianggap secara meluas sebagai aktivis-intelektual yang utama, pembaharu yang kreatif yang telah menyumbang pada isu-isu pembaharuan dan perbaikan Islam terkait hubungan Islam dengan sekularisme, demokrasi, masyarakat sipil, dan hak-hak perempuan.

Pada dasarnya artikel ini memfokuskan tentang aspek-aspek pemahaman intelektual dan respons Ghannouchi terhadap isu-isu kontemporer yang kritis (Mohammad Dawood Sofi 2018), teori-teori politiknya tentang persoalan Islam dan demokrasi dan keselarannya, teori pembagian kekuasaan, dan pembaharuan pasca-Musim Semi Arab serta prinsip kesederhanaannya yang mengakomodasi filsafat-filsafat Barat modern dan hubungannya dengan tradisi pemikiran Islam dalam konteks *siyasah syar'iyyah* dan pergerakan politik yang dibawanya. Ia turut meninjau pandangan dan analisis lain yang mengkritisi filsafat dan gagasan politiknya serta kekuatan pengaruh dan aspirasi demokratis yang diilhamkannya.

Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur-literatur terdahulu mengenai pemikiran Rachid Ghannouchi, menemukan sejumlah penulisan yang signifikan terkait dengan ide-ide politiknya. Dalam penelitian mereka tentang kematangan proses demokrasi di Tunisia pasca-revolusi Jasmine, M. Zaidi A. Rahman, Makmor Tumin, dan Azmil Zainal Abidin (2023) menyoroti peran Rachid Ghannouchi sebagai ideolog utama dalam protes massal yang mendorong tercetusnya kebangkitan Musim Semi Arab dan transisi demokratis dan bertapaknya pengaruh Islamis yang telah menarik dukungan yang signifikan dari masyarakat luas. Ia menjelaskan kebijakannya dalam mengatur dasar dengan mempertimbangkan faktor lokal dalam realitas yang kompleks di Tunisia (Ghannouchi, 2018) yang merayakan kemajemukan dan memilih pertimbangan-pertimbangan yang realistis untuk menghindari polarisasi dan perpecahan dalam proses transisi dan demokratisasi dalam bentuk kompromi dan penerimaan pembagian kekuasaan.

Dalam biografinya yang rinci tentang karier politik Ghannouchi bertajuk Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism, Azzam Tamimi mengkaji fenomena politik Islam di dunia Arab, dengan memfokuskan pada sejarah hidup Ghannouchi yang mewakili jalur politik Islam yang modern. Ia melihat dampak pemikirannya dalam ruang publik dan kecenderungan-kecenderungan awalnya terhadap pemikiran-pemikiran sosialis, Islamis, pan-Arab, salafis, dan Marxis dari pengaruh Nasserisme, Baathisme, Nasir al-din al-Albani, dan Ikhwanul Muslimin yang ditekuninya. Ia turut menyoroti pandangan globalnya tentang isu-isu sekuler, otoritarian, kerakyatan, dan keislaman yang menunjukkan kekuatan ide-ide politiknya yang beraliran moderat, perseptif, dan mencari titik temu terhadap proses perubahan. Pemikirannya berevolusi dengan narasi politik pasca-kolonial yang berdimensi revolusioner dalam konteks aktivismenya dalam *Harakah al-Ittijah al-Islami* atau MTI (*Islamic Tendency Movement*) dan kemudiannya menjadi *Harakah En-Nahdah* yang

menunjukkan banyak introspeksi dan lintasan ke depan yang diunjurkan dalam tindak-tanduk politiknya. Ia turut terpengaruh oleh pengalaman pejuang pembebasan Tunisia, pemikir dan intelektual seperti Khayr al-din al-Tunisi, al-Tahtawi, al-Tha'labi, al-Fasi, Malek Bennabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur (1879-1973), dan Muhammad Abduh.

Persoalan tentang keabsahan dan legitimasi politik Islamis dalam era pasca-Islamisme menjadi tema penting dalam pemikiran politik Islam yang ditinjau dari kerangka *siyasah syar'iyyah, fiqh waqi'*, dan argumentasi maqasid. Ennahda, yang dihapuskan secara sistematis selama hampir dua puluh tiga tahun oleh Ben Ali, telah mengambil keputusan yang bermakna untuk menggantikan rezim autokratik dengan peralihannya dari 'Political Islam' kepada 'Muslim Democrat' sebagai rezim demokratis. Menurut Maszlee Malik (2016) al-Nahdah menolak pendekatan radikal dan ekstremis yang terkait dengan Politik Islam, sebaliknya mempromosikan negara sipil berdasarkan prinsip maqasid yang diinspirasikan oleh perumusan demokratis Ghannouchi dengan sentuhan filsafatnya yang mengartikulasikan sisi-sisi demokratis yang universal dan ideal.

Kesesuaian prinsip Islam dan demokrasi yang digariskan oleh Ghannouchi, banyak dibahas dalam konteksnya yang global oleh Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, dan Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari (2021); Muhammad Rusdi Muhammaddiah, Muhazir (2021); dan Shakira Alisakun (2020) yang mengupas perspektif dan filsafatnya yang sentral tentang konsep demokrasi. Ide ini merangkul paham kebebasan, hak asasi, keadilan, dan pluralitas dan konsep-konsep dasar seperti syura, ijtihad, maslahah, serta nilai-nilai modern yang dipertahankannya yang mencorakkan etos dan pengalaman Islam yang dinamis dan responsif dalam sejarah modern.

Tulisan-tulisan lain yang kritis tentang al-Nahdah oleh Michael Collins (1996), Noureddine Jebnoun (2014), Anne Wolf (2017), dan Mohammad Dawood Sofi (2018) dan kumpulan makalah Ghannouchi seperti *Maqalat, Minal-Fikr al-Islami Fi-Tunis* (Pemikiran Islam di Tunisia), *Al-Mar'ah al-Muslimah Fi Tunis Bayna Tawjihat al-Qur'an Wa Waqi' al-Mujtama' at-Tunisi* (Perempuan Islam di Tunisia antara anjuran al-Qur'an dan realitas masyarakat Tunisia), *Ath-Thawrah al-Iraniyah Thawrah Islamiyah* (revolusi Iran adalah revolusi Islam), *Al-Islam Yuwli 'Inayatan Kubra Lil-Mujtama' al-Madani* (Islam memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat madani), *al-Dimuqratiyah wa Huquq al-Insan fi al-Islam dan al-Hurriyat al-'Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyah* (*Public Liberties in Islamic State*) yang dikembangkan dari ide Bennabi turut dirujuk sebagai pelengkap pada penelitian tentang

pemikirannya terkait persoalan-persoalan kebebasan, hak asasi, pemisahan kekuasaan, dan lain-lain.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dari jenis tinjauan dokumenter dan analisis konten. Ia menerapkan pendekatan historis, deskriptif, dan analitis dalam penganalisisan data dan materi yang diperoleh dari sumber-sumber arsip, termasuk manuskrip, tesis, buku, artikel, majalah, dan jurnal. Informasi yang terkumpul ini kemudian dianalisis secara ilmiah untuk mendapatkan kesimpulan dan perumusan yang akurat.

Hasil Dan Pembahasan

Latar Belakang dan Biografi

Rachid Ghannouchi merupakan seorang pemikir ulung, intelektual, dan politikus Islam yang terkenal sebagai pejuang demokrat dan aktivis dalam gerakan politik Islam kontemporer. Beliau pernah mendekam dalam penjara sebanyak 2 kali di bawah rezim autokratik Habib Bourguiba, dan hidup dalam pengasingan (*self-exiled*) di London selama 22 tahun. Diakui sebagai salah satu dari 100 individu paling berpengaruh di dunia (majalah Times, 2012), penerima penghargaan bergengsi Chatham House 2012 dari Prince Andrew, Duke of York bersama dengan Presiden Tunisia, Moncef Marzouki, karena "kompromi yang berhasil yang keduanya capai ketika transisi demokratis Tunisia" (*successful compromises each achieved during Tunisia's democratic transition*), dan tersenarai sebagai salah seorang tokoh penentu dan ideolog dalam dunia Islam kontemporer dalam buku Makers of Contemporary Islam, dan antara 100 pemimpin Islam terkemuka pada abad ke-20 (Mohd Mansoor Alam, et. al., 2005) Ghannouchi dilihat sebagai harapan global untuk merealisasikan aspirasi demokrat Islam di seluruh dunia.

Dilahirkan pada 22 Juni 1941 di Tenggara Tunisia, Ghannouchi menempuh pendidikan menengahnya di madrasah Zaytouna. Pendidikannya yang tradisional memfokuskan pada "masalah-masalah yang tidak lagi mengenai kita yang telah dipaksakan kepada kita oleh kolonialisme dan yang telah menjadi status quo." (Tamimi, 2001: 11) Setelah menamatkan studinya beliau belajar sementara di Fakultas Teologi, Universitas Zaytouna (yang dikenal sebagai universitas Islam pertama di dunia yang didirikan pada 737 Masehi). Bagaimanapun, terbelah antara tradisionalisme dengan masyarakat baru yang berorientasi Barat di mana ia tinggal, beliau meninggalkan Zaytouna, belajar pertamanya secara singkat di Kairo dan kemudiannya di Damaskus, di mana beliau memperoleh gelar sarjananya (Noureddine, 2014)

dan selanjutnya meneruskan studi pascasarjananya di Universitas Sorbonne, Paris.

Masanya di Universitas Damaskus (1964-1968) menandakan titik peralihan yang besar dalam kehidupannya. Dampak dari kekalahan Arab (gabungan tentara Mesir, Suriah, dan Yordania menentang militer Israel) dalam Perang Enam Hari pada 1967 mempermalukan nasionalisme Arab. Seperti kebanyakan pemuda Arab, al-Ghannouchi beralih kepada Islam, tetapi kepada visi Islam yang lebih progresif "Islam yang hidup" (John L. Esposito dan John O. Voll, 2011: 95) berbeda dengan Zaytouna dan universitas-universitas Islam lain yang konservatif yang dianggapnya sebagai "museum". Pada 1970 Ghannouchi pulang ke tanah airnya di Tunisia dan mengajar filsafat di sekolah menengah serta mulai berdakwah di masjid, dan membentuk gerakan akar rumput Islamnya yang kecil yang kemudiannya menjadi kekuatan utama dalam kebangkitan kembali Islam di ranah Tunisia yang sekuler.

Sejak pertengahan 2021, dengan krisis politik dan konstitusional yang meningkat, dan ancaman kelompok sekuleris, Tunisia memasuki fase yang memburuk dengan serangkaian protes yang membawa pada penangguhan parlemen dan pemberlakuan darurat oleh Presiden Kais Saied pada 25 Juli 2021. Ia mengeluarkan dekret pada 22 September 2021 yang memberikannya kekuasaan penuh untuk merombak pemerintah dan membubarkan parlemen. Ini diikuti dengan penangkapan dan penahanan Ghannouchi pada 17 April 2023, selaku mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tunisia dan pemimpin partai Ennahda, yang mendakwa Kais telah melanggar praktik demokrasi dan mengerahkan bantahan serta unjuk rasa terhadap kudeta tersebut. Pemimpin-pemimpin partai didakwa merencanakan tindakan terorisme dan rekening serta aset utamanya dibekukan oleh Mahkamah Tunisia. Ghannouchi berhadapan dengan dakwaan korupsi, pencucian uang, dan terorisme serta divonis dengan hukuman penjara setahun pada 15 Mei 2023 atas dakwaan berkonspirasi terhadap keamanan negara dan ingin mengubah corak pemerintahan. Dalam pendakwaan yang berbeda, beliau dihukum tiga tahun penjara pada 1 Februari 2024 dan partainya didenda $ 1.170.000 atas dakwaan melobi dan menerima dana asing.

Sejak pengambilalihan kekuasaannya sendiri pada Juli 2021, otoritarianisme kian meningkat, pembungkaman terhadap pengkritik terus merajalela, calon-calon presiden yang lain ditahan, dan institusi demokratis dihapuskan. Langkah otoriter Saied ini dilihat sebagai percobaan dangkal dan usang untuk meneruskan budaya korup dalam siasat politiknya yang semakin terancam.

Transisi Demokratis

Transisi demokratis Tunisia dicapai setelah jatuhnya rezim Zine El Abidine Ben Ali pada 14 Januari 2011. Dipicu dari gejolak sosial dan politik yang paling dramatis dengan protes massal 2010-2011 dan kemarahan akibat tekanan dan kenaikan harga makanan serta bahan bakar, masalah korupsi, pengangguran, dan kebebasan yang dikekang, Revolusi Tunisia atau Jasmine Revolution ini telah menyaksikan kebangkitan fajar baru bagi sistem multipartai, pemerintahan demokratis, dan pemilihan umum pertama yang bebas di republik tersebut setelah 23 tahun ditindas rezim autokratik: *"Today, we can assure you that it will not turn into a fundamentalist "religious" or "secular" winter but into a democratic spring where all have a place"* – Hari ini, kita dapat memastikan bahwa ia tidak akan berubah menjadi musim dingin fundamentalis "agama" atau "sekuler" tetapi menjadi musim semi demokrasi di mana semua memiliki tempat (Rachid Ghannouchi, 2012)

Melampaui asal-usulnya sebagai sebuah "partai Islam", al-Nahdah telah mengumumkan peralihan yang bersejarah dari anutannya kepada Islam politik menjadi Muslim demokrat yang diumumkan dalam usul yang dibahas dalam referendum partai, yang menunjukkan keyakinannya terhadap demokrasi yang diterima dalam perspektif gerakan dan partisipasi suaranya dalam pemilihan umum: *"We are leaving political Islam and entering democratic Islam. We are Muslim democrats who no longer claim to represent political Islam."* - Kita meninggalkan Islam politik dan memasuki Islam demokratis. Kita adalah demokrat Muslim yang tidak lagi mendakwa mewakili Islam politik (Rachid Ghannouchi, 2016)

Walaupun menang dengan mandat yang besar, Ennahda memilih untuk bekerja sama dengan partai sekuler sosial demokrat, dan membentuk mufakat politik (koalisi "Troika") dengan partai al-Muktamar atau *Congres pour la Republique* (CPR) yang dipimpin oleh Moncef Marzouq (yang kemudian dipilih sebagai presiden pertama Tunisia pasca-revolusi pada 12 Desember 2011) dan partai al-Takattol atau *democratique pour le travail et les libertes* (FTDL) yang dipimpin oleh Mustapha Ben Jaafar. Kesediaan Ennahda berbagi kekuasaan dan memilih jalan sekutu ketimbang monopoli tunggal, adalah untuk menghindari kemungkinan manipulasi kekuasaan dan arogansi kekuasaan melalui proses pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) dan mencapai keputusan yang kolektif: *"By sharing power with the opposition, we protect ourselves from the temptation of monopolizing power and arrogance of power. At the same time, power-sharing protects us from the threat of being subjected in the future to exclusion, marginalization, and torture."* (Noureddine Jebnoun, 2014)

Menurut Ghannouchi (1993: 88), demokrasi bukanlah suatu filsafat atau ideologi, tetapi serangkaian alat dan mekanisme untuk mengontrol pemerintah. Beliau mengambil konsep demokrasi yang dirumuskan oleh Bennabi yang menjelaskan entitas politik Islam sebagai pendekatan psiko-sosiologis dan langkah pendidikan untuk seluruh rakyat (Ghannouchi, 1993: 75-6). Demokrasi, sebagaimana dipahami Bennabi (1991: 133), bukan sekadar proses politik tetapi sentimen masyarakat ke arah isu-isu kolektif yang bermula dengan menjana semangat demokratis dalam diri individu bersama dengan jiwa dan etika kolektif sebelum menerapkannya sebagai proses politik. Dengan ini, otoritas dapat dipindahkan kepada publik, dan konstitusi suatu bangsa menjadi berdaulat.

Paradigma Politik

Dalam penulisannya yang prolifik tentang ide dan pemikiran politik, Ghannouchi menekankan aspirasi kebebasan dan idealisme maqasid yang meluas. Beliau menegaskan ide kebebasan, konsep negara madani dengan dasar liberal dan pluralisme politik, dan prinsip maslahah serta maqasid syariah yang berakar dari pemahaman yang ideal tentang tuntutan politik yang praktis dan realistis (*fiqh al-waqi*'): *"We want a party that talks about everyday problems, and not one that talks about the Last Judgment and Paradise. We want religious activity to be completely independent of political activity"* - Kita ingin partai yang berbicara tentang masalah sehari-hari, dan bukan yang berbicara tentang Hari Akhirat dan Surga. Kita ingin aktivitas agama sepenuhnya independen dari aktivitas politik (Ghannouchi, 2016).

Tanpa memasukkan ketentuan syariah dalam konstitusi dasar, Ennahda disifatkan sebagai "partai politik, demokratis, dan sipil" - yang mengilhamkan keterbukaan dan kebebasan serta mempertahankan aspirasi liberal dan prinsip demokratis dalam masyarakat sipil, *"The state should not have anything to do with imposing or telling people what to wear, what to eat and drink, what they believe in, what they should believe in"* (negara tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksa atau memberitahu orang-orang apa yang harus dipakai, apa yang harus diminum dan dimakan, apa yang mereka percayai, apa yang seharusnya mereka percayai).

Konsensus politiknya tidak lagi berporos pada Islamisme, yang didefinisikan oleh Bobby S. Sayyid (2003) dalam bukunya *"A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism"* (Ketakutan yang Fundamental: Eropasentrisme dan Kemunculan Islamisme) tentang proyek politiknya sebagai: "Islamisme adalah proyek yang mencoba untuk mentransformasi Islam dari titik pusat dalam wacana masyarakat Muslim

menjadi penentu utama. Secara khusus, proyek Islamis adalah usaha untuk menjadikan Islam penentu arah dalam tatanan politik."

Proyek politik Islam ini telah mengambil arah baru setelah apa yang dikenal sebagai Arab Spring (Musim Semi Arab) atau Arab Awakening (Kebangkitan Arab). Diskusi sekarang bukan tentang mendirikan negara Islam atau melaksanakan undang-undang hudud. Aspirasi sekarang adalah untuk membangun kembali Muslim yang bertakwa dalam sebuah negara yang demokratis. Ghannouchi dengan jelas menolak negara Islam dengan memilih demokrasi parlementer. Partainya Ennahda berkomitmen pada keadilan sosial, demokrasi multipartai, dan pluralisme agama. Ghannouchi menekankan bahwa tidak ada dasar ketidakselarasan antara Islam dan sekularisme. Beliau mempertahankan satu tingkat pemisahan antara politik dan urusan agama dalam apa yang dikenal sebagai as-siyasi (politik atau duniawi) dan ad-deeni (agama atau sakral). (Ghannouchi, 2012) Menurutnya: "sekularisme bukanlah filsafat ateis melainkan hanya sekumpulan susunan prosedur yang dirancang untuk mempertahankan kebebasan beragama dan berpikir."

Seorang Profesor Sosiologi di University of Illinois, Asef Bayat (1996) mengungkapkan peralihan ini sebagai pasca-Islamisme. Terdapat peralihan yang jelas dari slogan lama al-Islam huwa al-hal – Islam adalah solusi bagi semua masalah – ke pendekatan dan solusi yang lebih praktis. Sebagaimana diutarakan oleh Ghannouchi dalam menafsirkan sabda Nabi (SAW): "Kamu adalah kalangan yang terbaik yang mengetahui apa yang memberi manfaat dalam urusan duniamu," yang menunjukkan ia bukanlah tugas agama untuk mengajarkan kita hal-hal pertanian, industri, atau bahkan tata cara pemerintahan. Kemampuan akal sanggup untuk mengajarkan kebenaran ini melalui timbunan pengalaman. Peran agama, bagaimanapun, adalah untuk mengurai pertanyaan-pertanyaan besar bagi kita, menyangkut eksistensi, asal-usul, nasib, dan tujuan kita diciptakan. Ia adalah untuk membekali kita dengan sistem nilai dan prinsip yang dapat menentukan arah pemikiran dan tindakan kita serta peraturan negara yang kita cita-citakan. (Ghannouchi, 2012)

Bayat juga menekankan bahwa pasca-Islamisme tidak sekadar suatu kondisi tetapi juga suatu proyek, suatu percobaan yang sadar untuk merancang konsep dan strategi dalam dasar dan metode untuk menembus Islamisme dalam lapangan sosial, politik, dan intelektual. Pasca-Islamisme mewakili suatu ikhtiar untuk menggabungkan keagamaan dengan hak, kepercayaan, dan kebebasan, Islam dan kebebasan sipil, dan memfokuskan terhadap hak dibandingkan tanggung jawab, pluralitas dibandingkan otoritas yang tunggal, historisitas dibandingkan dengan interpretasi kitab yang kaku dan mutlak, dan masa depan dibandingkan dengan masa lalu. (Asef Bayat, 2007)

Islam dalam satu cara atau lainnya senantiasa memengaruhi negara di bawah pemerintahan umat Muslim sepanjang sejarah. Islam tidak mengenal pemisahan antara negara dan agama dalam pengertian menyingkirkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Bagaimanapun, pembatasan yang jelas harus dibuat antara apa yang termasuk dalam lapangan al-deeni atau agama dan yang tercakup dalam al-siyasi atau politik. Ahli fikih (*fuqaha*) Islam yang besar seperti asy-Syatibi dan Ibnu Ashur telah sepakat bahwa tujuan tertinggi dari semua pesan wahyu adalah untuk menegakkan keadilan dan mencapai maslahah dengan merealisasikan kepentingan umat. Pencarian keadilan dan maslahah umum diusahakan hanya melalui kemampuan akal. Dan agama hanya menyediakan nilai dan garis panduan dalam pencarian ini.

Negara Madani

Ghannouchi memperjuangkan idealisme kebebasan dan negara madani (*Daulah Madaniyyah*) yang ditegakkan berdasarkan konsensus dan ijtihad. Berhadapan dengan tantangan realpolitik, beliau menekankan prinsip musyawarah dalam pemerintahan. Aspirasi politik yang diilhamkan dari tradisi pemikiran Islam dan kerangka epistemologinya yang menjunjung prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (al-*musawah*), perundingan (*musyawarah*), menjamin kebebasan (*al-hurriyyah*), dan memartabatkan hak serta kekuasaan rakyat (*al-ha'b masdar al-sultah*) rakyat sumber kedaulatan.

> "Sementara ruang lingkup agama adalah kepatuhan dan kewajiban, politik adalah ruang lingkup pemikiran dan ijtihad" (Rachid Ghannouchi, 2012)

Visi moral dan ideologi pemikiran serta sumbangannya pada pergerakan dan aspirasi politik modern dan demokratis yang universal ini dikupas oleh Azzam Tamimi dalam bukunya Rachid Ghannouchi: *A Democrat Within Islamism* [Rachid Ghannouchi: Demokrat dalam Islamisme] yang meletakkan landasan dan khitah perjuangan Ghannouchi serta filsafat politiknya:

> *"The significance of Ghannouchi also emanates from the facts that, unlike other Islamic thinkers who espouse the democratic cause, he is both a thinker and a leader of an Islamic movement. He is a credible authority within Islamic circles at the global level. His thoughts are in no way restricted to an intellectual debate at a time when the Islamic movement has emerged as a major political power in the Muslim world, and when power-sharing or power taking experiments are in process. Ghannouchi is unprecedented within Islamic intellectual circles in his*

> *theory that civil society is an Islamic concept and that religion consolidates civil society whereas secularism, especially the model imported to the Muslim world under the guise of modernization, weakens it."* (Azzam S. Tamimi, 2001: 215)

"Signifikansi Ghannouchi juga lahir dari kenyataan bahwa, tidak seperti pemikir Islam lainnya yang mendukung perjuangan demokratis, beliau sekaligus adalah pemikir dan pemimpin gerakan Islam. Beliau adalah otoritas yang berwibawa dalam lingkaran Islam pada tingkat global. Pemikirannya sama sekali tidak terbatas pada perdebatan intelektual pada saat gerakan Islam telah bangkit sebagai kekuatan politik utama di dunia Islam, dan ketika pembagian kekuasaan atau eksperimen pengambilan kekuasaan sedang dalam proses. Ghannouchi tiada taranya dalam lingkaran intelektual Islam dengan teorinya bahwa masyarakat sipil merupakan konsep Islam dan bahwa agama memperkukuh masyarakat sipil sementara sekularisme, terutama model yang diimpor ke dunia Islam dengan kedok modernisasi, melemahkannya."

Prinsip Kebebasan

Prinsip dan idealisme kebebasan yang diketengahkan Ghannouchi ini berakar dari prinsip dan manhaj politik yang signifikan yang diuraikan secara mendalam dalam karya-karyanya seperti *al-dini wal-siyasi fil Islam* (Yang religius dan yang politis dalam Islam), *al-'ilmaniyyah wa al-'ilaqah al-din bi ad-daulah min manzur harakah al-nahdah* (sekularisme dan hubungan antara agama dan politik dari perspektif partai al-Nahdah), *visions for a new Tunisia: how Islam and democracy can support each other* (visi menuju Tunisia yang baru: bagaimana Islam dan demokrasi dapat mendukung satu sama lain) dan lain-lain.

Dalam kerangka menuntut kebebasan dan menegakkan struktur modern dalam konstitusi politik, Ghannouchi menggagas sifat netralitas negara, yakni, negara adalah penjamin bagi semua kebebasan baik agama, politik, maupun lainnya. Dan negara tidak seharusnya campur tangan memihak pada partai ini atau lainnya: *"This is good for politicians because they would no longer be accused of manipulating religion for political means and good for religion because it would not be held hostage to politics"*. (Rachid Ghannouchi, 2016)

Idealisme kebebasan yang menekankan pemisahan agama dan politik ini ditekankan dalam kongres Ennahda yang terbaru dalam slogannya *"Abandonment of political Islam and separation between politics and practice of preaching"* (peninggalan politik Islam dan pemisahan antara politik dan praktik dakwah). Ini untuk mencapai keharmonisan sosial dan mencari suatu keseimbangan yang akan menjamin kebebasan dan hak publik, di mana "untuk

mencapai keseimbangan ini, kita harus kembali pada isu tentang membedakan antara agama dan politik dan menyesuaikan parameter terhadap apa yang tetap dalam agama (*al-thawabit*) dan apa yang berubah." (*al-mutaghayyirat*) (Rachid Ghannouchi, 2012).

Beliau turut menjelaskan hubungan antara Islam dengan sekularisme, yang bersifat harmonis dan timbal balik, di mana tidak ada pertentangan atau konflik antara keduanya, "Kita telah menunjukkan bahwa sekularisme bukanlah filsafat ateis melainkan hanya sekadar penetapan serangkaian prosedur yang dirancang untuk melindungi kebebasan beragama dan berpikir" (Rachid Ghannouchi, 2012).

Menurutnya, tidak ada artinya memaksa manusia untuk menjadi Muslim, umat Islam tidak membutuhkan orang munafik yang memamerkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran; dan seseorang yang melafalkan dua kalimat syahadat, harus melakukannya dengan berpijak pada kebebasan memilih yang didukung oleh kesadaran dan keyakinan. (Rachid Ghannouchi, 2012)

Visi Islam Tunisia

"Tunisia is now a democracy. The 2014 constitution has imposed limits on extreme secularism and extreme religion" – Rached Ghannouchi (Tunisia kini adalah sebuah demokrasi. Konstitusi 2014 telah membatasi sekularisme yang ekstrem dan agama yang ekstrem)

Revolusi yang terpicu pada 2010-2011 di Tunisia telah menciptakan kekuatan dan keyakinan baru bagi rakyat Tunisia, yang telah mengembalikan kebebasan dan harga diri mereka, serta telah memicu perubahan penting dalam lanskap politik Tunisia, yang melahirkan semangat persatuan dan solidaritas yang kuat, *"In achieving it, Tunisians must come together and thus, the national unity should be our main priority in maintaining the revolution."* (dalam mencapainya, rakyat Tunisia harus bahu-membahu, dan oleh karena itu, persatuan nasional harus menjadi prioritas utama kita dalam mempertahankan revolusi)

Bagaimanapun, revolusi politik yang menuntut perubahan ini hanya sebagian kecil dari perjuangan revolusi yang lebih besar - revolusi dan perubahan internal sebagai revolusi yang sesungguhnya, sebagaimana ditekankan Ghannouchi, *"political revolution is only part of the process; however, the real revolution that must take place is the revolution within every people's life and their attitude. The change of the country's system is not*

enough without the change in people's attitude and their way of thinking. The real revolution must uphold the people's change within to ensure human dignity (al-karamah al-insaniyah) as the cardinal principle of the society" (Maszlee Malik, 2014) "revolusi politik hanyalah bagian dari proses; bagaimanapun revolusi sesungguhnya yang harus terjadi adalah revolusi di dalam kehidupan setiap orang dan sikap mereka. Perubahan sistem negara tidaklah cukup tanpa perubahan dalam sikap manusia dan cara berpikir mereka. Revolusi yang sesungguhnya harus menjunjung tinggi perubahan internal manusia untuk memastikan kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*) sebagai prinsip utama dalam masyarakat."

Transformasi politik dan pembaharuan kreatif yang diperkenalkan oleh partai *Hizb Harakat En-Nahda* (Partai Renaisans), dan manifesto politiknya yang digembleng dari idealisme serta cita-cita kebebasan telah membawa stabilitas di kawasan itu, berkat kekuatan dan kematangan politik Ghannouchi, yang berkomitmen memperjuangkan nilai yang inklusif dan plural, serta membawa paradigma moral dan prospek nilai, sebagaimana diungkapkan oleh Anas Altikriti, intelektual Islam Inggris *"His vision for the model of an Islamic nation is built heavily on the idea of values"* – (visinya bagi model negara Islam banyak dibangun di atas gagasan tentang nilai).

Pemulihan Ekonomi

Tantangan yang kentara setelah mencapai transisi kekuasaan adalah memulihkan keyakinan rakyat dan strategi untuk membangun serta memulihkan kembali ekonomi yang sedang krisis. Menurut laporan Arab *Institute for Human Rights* (Institut Hak Asasi Arab) dan Arab NGO *Network for Development* (Jaringan LSM Arab untuk Pembangunan) pendorong dan pemicu sebenarnya terhadap Revolusi Tunisia hakikatnya bersumber dari dua faktor utama: kesulitan ekonomi dan penindasan politik di wilayah tersebut. Ternyata perlawanan terhadap Ben Ali di Tunisia tidak berkaitan dengan agama atau sekuler. Sebaliknya tuntutan ke arah menghentikan korupsi, kronisme, dan penindasan politik dan, pada dasarnya untuk peningkatan kondisi ekonomi.

Para demonstran telah menaruh harapan yang tinggi untuk mengubah nasib mereka yang diperas oleh ketimpangan dan kebobrokan sistem yang menekan. Visi ini dipersulit oleh ketidakpastian politik dan kehancuran ekonomi di mana keinginan untuk membangun sistem sosio-ekonomi berdasarkan "martabat, kebebasan, dan kesetaraan adalah tuntutan utama dari para demonstran di seluruh wilayah dan apa yang membawa mereka pada perubahan besar ini."

Ennahda telah diberikan peluang untuk memperbaiki masalah ini, terutama pengangguran yang berlarut-larut yang menafikan begitu banyak pemuda Tunisia dari harapan dan martabat. Oleh karena itu, Ennahda menyerukan dialog ekonomi nasional yang komprehensif dengan pendekatan partisipasi semua pihak untuk melakukan perubahan berdasarkan visi "kapitalisme penyayang" - sebuah pendekatan yang menyeimbangkan antara kebebasan wirausaha dengan cita-cita keadilan sosial dan peluang yang setara (Ghannouchi, 2016). Perencanaan kebijakan neoliberal Ennahda ini menampilkan agenda ekonomi yang lebih setara dan adil yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan bukan hanya segelintir kecil, dalam mengurangi kesenjangan sosial dan jurang ekonomi antara yang kaya dan miskin.

Keseluruhan episode Musim Semi Arab tidak hanya dipahami sebagai kebangkitan Islam atau aspirasi untuk menjadi lebih Islami, melainkan karena keluhan ekonomi. Dalam hal ini, Ennahda telah berhasil mendesak peningkatan bantuan pemerintah kepada pedagang kecil dan kelompok petani, selain mendiversifikasi hubungan perdagangan Tunisia dan tingkat ekspornya ke negara-negara tetangga (Ghannouchi, 2016). Pemerintah dengan prestasi dan wawasan jangka panjangnya telah memulai langkah ke depan untuk menjamin nilai keberlanjutan, stabilitas, dan transparansi dalam struktur ekonomi, dan sosio-budaya yang luas, menghapuskan korupsi dan paham yang bertentangan dengan Islam selain membuka peluang-peluang perdagangan baru di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, serta memajukan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Kesulitan ekonomi dan sosial yang memburuk dicoba ditangani dengan cara membantu meningkatkan taraf hidup penduduk dan menjamin pertumbuhan dan sumber daya ekonomi. Dalam mengatasi ketergantungan pada negara, Ennahda mengimbau suatu peralihan dengan mewujudkan budaya kewirausahaan di kalangan pemuda. Menteri Pelatihan Vokasional dan Ketenagakerjaan yang merupakan salah seorang anggota Ennahda, Zied Ladhari, telah memperkenalkan suatu reformasi yang sangat berambisi dan diperlukan, yakni program baru yang diluncurkan untuk melatih lebih dari 60.000 warga Tunisia yang menganggur, memodifikasi pusat pelatihan kerja, dan mewujudkan otoritas lokal sebagai panduan karier.

Dengan program baru ini diharapkan dapat mengubah lanskap politik nasional dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di sektor pendidikan, bisnis, kewirausahaan, perempuan, dan hubungan publik-swasta melalui pendekatan baru yang merangkumi fokus terhadap pemberdayaan ekonomi dan

memerangi korupsi, meningkatkan taraf hidup, serta meninggikan martabat sosio-ekonomi rakyat.

Kesimpulan

Paradigma politik Syekh Rached Ghannouchi dan perjuangan demokratis yang digerakkannya mewakili Partai Ennahdha dan dasar konstitusionalnya yang memperjuangkan politik Islam dan aspirasi pembaharuan telah menyumbang pada perkembangan gerakan politik yang progresif dan signifikan di dunia Islam. Dalam merumuskan usahanya ini, ia turut mempertimbangkan kebutuhan lokal dan corak sekularisme yang telah mendarah daging dalam masyarakat Tunisia (yang dijuluki pusat sekularisme dunia Arab), di mana tradisi dan perjuangan yang diilhamkannya telah membawa kemajuan dalam mengembangkan pemahaman Islam yang moderat, yang mengimbangi pandangan-pandangan politiknya yang luas dan matang. Kepemimpinannya, tanpa terkecuali turut dikritik karena kecenderungan patriarkalnya tanpa menafikan sumbangan dan citranya sebagai pelopor demokratis dalam menganjurkan idealisme kebebasan dan membawa ideologi politik yang modern dan liberal, adaptif dan demokratis, yang tunduk pada demokrasi liberal dan prinsip tanpa campur tangan negara dalam urusan pribadi – seperti pelarangan konsumsi alkohol atau pengenaan hijab – berlandaskan nilai-nilai syariah yang substantif dan universal, identitas budaya, serta paham kemanusiaan universal.

Daftar Pustaka

Anne Wolf, Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Anne Wolf, Ben Ali's Tunisia: Power and Contention in an Authoritarian Regime. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi: Seorang Demokrat dalam Wacana Islamisme, terj. Muhammad Syamil Dzulfida & Ahmad Nabil Amir. Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front, 2018.

Bayat, Asef, "The Coming of a Post-Islamist Society", Critique, (Fall, 1996): 43-52.

Bayat, Asef, "Islam and Democracy: What is the Real Question?" ISIM Papers, N8. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

Bennabi, Malik, Al-Qadaya al-Kubra. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

Bobby, S. Sayyid, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism. London: Zed Books, 2003.

Dunn, Michael Collins, "The Al-Nahda Movement in Tunisia: From Renaissance to Revolution." Dalam Islamism and Secularism in North Africa, ed. John Ruedy. New York: Palgrave Macmillan US, 1996.

John L. Esposito dan John O. Voll, Makers of Contemporary Islam. New York: Oxford University Press, 2001.

Linda G. Jones, "Portrait of Rachid al-Ghannouchi," Middle East Report, Vol. 18, No. 153 (July-August 1988): 19-22.

M. Zaidi, Makmor, Azmil, "Politik Islam dalam Konteks Tunisia Pasca Revolusi Jasmine," Afkar Vol. 25 No. 2 (2023): 499-542.

Malik, Maszlee, "Tatakelola Kerajaan yang Baik (Good Governance), Gerakan Islam dan Rashid Al Ghannoushi," dalam Zulkifli Hasan, ed., Rashid Al Ghannoushi Intelektual-Reformis Gerakan Islam (pp. 41-62). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 2013.

Malik, Maszlee, "An Interview with Dr. Rashid Ghannouchi," Kulliyyah Research Bulletin, Vol. 5, No. 2 (December 2014): 1-3.

Malik, Maszlee, "Tunisia, al-Nahda dan Gerakan Islam," dalam Rashid Al Ghannoushi Intelektual-Reformis Politikal Islam (pp. 125-144). Petaling Jaya, Selangor: Angkatan Belia Islam Malaysia & Ilham Books, 2016.

Mohammad Dawood Sofi, Rashid al-Ghannushi: A Key Muslim Thinker of the 21st Century. Singapore: Palgrave Pivot, 2018.

Mohd, Manzoor Alam, The 100 Great Muslim Leaders of the 20th Century. New Delhi: Institute of Objective Studies, 2006.

Muhammad Rusdi, M., "Islam Demokratis Perspektif Rachid Ghannouchi," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16, No. 1 (2021): 19-36.

Noureddine Jebnoun, "Tunisia at the Crossroads: An Interview with Sheikh Rachid al-Ghannouchi". Foreword by John L. Esposito. ACMCU Occasional Papers, April 2014.

Noureddine Jebnoun (28 September 2015). "Tunisia di Persimpangan: Sebuah Wawancara Bersama Sheikh Rachid Al-Ghannouchi" (Diterjemahkan oleh Ahmad Muziru Idham Adnan, Shuhaib Ar Rumy Ismail dan Imran Mohd Rasid). http://irfront.net/post/articles/tunisia-di-persimpangan-sebuah-wawancara-bersama-sheikh-rachid-al-ghannouchi/ diakses 2 Oktober 2016.

Rachid, Ghannouchi, "The Participation of Islamists in a Non-Islamic Government", John J. Donohue, John L. Esposito, Islam in Transition: Muslim Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 1982.

Rachid, Ghannouchi, Maqalat. Paris: Dar al-Karawan, 1984.

Rachid, Ghannouchi, Minal-Fikr al-Islami fi Tunis. Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.

Rachid, Ghannouchi, Al-Hurriyat al-'Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyah. Beirut: Arab Unity Studies Center, 1993.

Rachid, Ghannouchi, "Al-Islam Yuwli 'Inayatan Kubra Lil-Mujtama' al-Madani", Al-'Alam (London), no. 612 (14 Maret 1998), dan no. 613 (21 Maret 1998).

Rachid, Ghannouchi, "Secularism in the Arab Maghreb", dalam Azzam Tamimi, John L. Esposito, eds., Islam and Secularism in the Middle East. New York: NYU Press, 2000.

Rachid, Ghannouchi, "Al-'Ilmaniyyah wa 'Ilaqah al-Din bi al-Dawlah min Manzur Harakah al-Nahdah" (Sekularisme dan hubungan antara agama dan negara dari perspektif partai al-Nahdah). Pidato di Centre for the Study of Islam and Democracy (CSID), Tunisia, 2 Maret 2012.

Rached, Ghannouchi, "From Political Islam to Muslim Democracy: the Ennahda Party and the Future of Tunisia," Foreign Affairs 95, No. 5 (2016): 33.

Rached, Ghannouchi, "Ennahda's Democratic Commitments and Capabilities: Major Evolutionary Moments and Choices," dalam Democratic Transition in the Muslim World (pp. 15-27). New York: Columbia University Press, 2018.

Shakira Alisakun, "Islam and Democracy: A Study on Rachid Ghannouchi's Views," Tafhim 13, No. 2 (2020): 27-54.

Z. Husaini, M. R. Mohd Nor, M. Zulfazdlee, "Sumbangan Rachid Ghannouchi dalam Mengharmonikan antara Islam dan Demokrasi," International Journal of West Asian Studies, 13 (2021): 147-159.

Zulkifli Hasan, ed., Rashid Al Ghannoushi Intelektual-Reformis Gerakan Islam. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 2013.